

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin negara selama satu periode. Seperti di Indonesia, pemilihan umum dilakukan untuk menentukan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, dan DPD. Selain itu pada tingkat daerah pemilihan umum lebih sering disebut dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk memimpin selama satu periode atau lima tahun. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila menjadi dasar dari berlangsungnya pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 secara serentak. Ada 115 kabupaten di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah baru untuk periode 2018-2023. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan PILKADA 2018 adalah Kabupaten Bogor. Pada pemilihan ini terdapat lima calon kepala daerah Kabupaten Bogor. Hasil pemilihan nomor urut pasangan calon kepala daerah pada PILKADA 2018 Kabupaten Bogor menetapkan nomor urut satu pasangan Fitri Putra dan Bayu Syahjohan, Ade Yasin dan Iwan Setiawan nomor urut dua, Ade Ruhandi dan Ingggrid Kansil nomor urut tiga, Gunawan Hasan dan Fickry Zulfikar nomor urut empat, Ade Wardhana dan Asep Ruhiyat nomor urut lima. Terdapat dua pasang calon kepala daerah maju sebagai peserta PILKADA 2018 sebagai pasangan independen yakni pasangan nomor urut empat Gunawan Hasan dengan Fickry Zulfikar dan pasangan nomor urut lima Ade Wardhana dengan Asep Ruhiyat. Pasangan nomor urut satu Fitri Putra dan Bayu Syahjohan didukung oleh partai PDI-Perjuangan dan HANURA. Nomor urut dua Ade Yasin dan Iwan Setiawan didukung oleh PKB, Gerindra, dan PPP. Nomor urut tiga Ade Ruhandi dan

Inggrid Kansil didukung oleh PKS, PAN, Nasional Demokrat, Demokrat, dan Partai Golkar.

Mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau ditunjuk oleh partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tentunya bukan hal yang mudah. Calon kepala daerah tersebut harus memiliki kualitas diri yang sesuai dengan kebutuhan daerah pencalonan tersebut, termasuk Kabupaten Bogor. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat Indonesia semakin kritis dan rasional terhadap keputusan politiknya. Membangun *personal branding* sebagai calon kepala daerah dilakukan oleh setiap pasangan calon kepala daerah untuk mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat.

Political branding terdiri dari pembangunan identitas baru, pendistribusian *branding*, dan pembangunan kepercayaan (Adolphsen, 2008). Merujuk pada teori tersebut terlihat jelas Ade Yasin sebagai salah satu calon kepala daerah melakukan pembangunan identitas baru dengan mengganti nama yang awalnya Ade Munawaroh Yasin menjadi Ade Yasin. Selain itu pendistribusian *branding* yang dilakukan Ade Yasin menggunakan sosial media Instagram, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Pembangunan identitas baru juga dilakukan oleh pasangan calon Ade Ruhendi – Inggrid Kansil. Ade Ruhendi menggunakan *political branding* nama Jaro Ade agar lebih mudah diingat oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menetapkan masyarakat Kabupaten Bogor yang memiliki hak untuk memilih sebanyak 3.374.610 jiwa. Berdasarkan data *website* Komisi Pemilihan Umum hasil penetapan pemilihan kepala daerah masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor sebanyak 2.358.564 jiwa dan tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1.016.046 jiwa. Pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan dinyatakan sebagai pemenang dalam PILKADA 2018 menurut hasil rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor. Ade Yasin dan Iwan Setiawan

mendapatkan suara sebanyak 912.221 suara atau 41,12% dari total suara sah. Pasangan Fitri Putra – Bayu Syahjohan mendapatkan 177.153 suara sah atau 7,99% dari total suara sah. Ade Ruhandi dan Inggrid Kansil mendapatkan 859.444 suara atau 38,74% dari total suara sah. Gunawan Hasan dan Fickry Zulfikar mendapatkan 100.745 suara atau 4,54% dari total suara sah. Ade Wardhana dan Asep Ruhiyat mendapatkan 168.733 suara sah atau 7,61% dari total suara sah.

Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut menunjukan peran partai politik dalam kemenangan pasangan calon kepala daerah memberikan pengaruh signifikan. Harrop dan Miller menyebutkan perilaku memilih dapat dianalisis dengan tiga penjelasan, yaitu pilihan partai, pendekatan sosiologis, dan pendekatan rasional (Pamungkas, 2010). GG Seran melakukan penelitian berjudul pilihan faktor – faktor penentu perilaku memilih dalam pilpres 2014 yang dilakukan di Kabupaten Bogor menunjukkan dari 105 responden yang tersebar di tiga kecamatan menunjukan 63,8% adanya ketertarikan pada partai politik tertentu dan 62,9% menunjukkana adanya keterikatan pada salah satu partai politik sehingga memilih pasangan calon yang diusung oleh partai politik tersebut (Seran, 2018).

Besarnya peran partai politik dalam kemenangan pasangan calon kepala daerah juga ditunjukkan dengan menangnya pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan yang diusung dan mendapat dukungan dari PPP, Gerindra, dan PKB. PPP adalah partai politik yang juga mengusung Rachmat Yasin (Bupati Kabupaten Bogor 2008 – 2018). Kemenangan partai PPP untuk ketiga kalinya di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor menunjuka partai tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Identifikasi partai yang terjadi di Kabupaten Bogor menjadi faktor penentu perilaku memilih yang menarik untuk diteliti. Faktor ini menarik karena Rachmat Yasin yang diusung oleh PPP dan menang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2008 dan 2013 adalah kakak kandung dari Ade Yasin. Mengutip dari Kompas tahun 2014 Rachmat Yasin tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penyelewengan jabatan penyuapan proyek Kawasan hutan oleh PT Bukit Jonggol Asri senilai Rp

4.500.000.000 dan divonis penjara selama lima tahun enam bulan. Tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh Rachmat Yasin tentunya merusak citra partai politiknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan seharusnya berdampak buruk kepada pemilihan kepala daerah 2018 di Kabupaten Bogor. Namun fakta menunjukkan Ade Yasin yang merupakan adik kandung dari Rachmat Yasin dan juga diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan tetap menang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2018 dengan perolehan suara 41,12%.

Ade Yasin sebelum mencalonkan diri sebagai peserta PILKADA 2018 merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2014 – 2019. Ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor semenjak pemilihan legislatif tahun 2009. Di partai politik Ade Yasin pada tahun 2010 menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Bogor dan tahun 2015 menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang Ade Yasin sebelum mencalonkan diri sebagai bupati Bogor menunjukkan Ade Yasin memiliki kapasitas dan pengalaman di pemerintahan dan partai politik. Hal ini menjadi asumsi dasar bahwa masyarakat memilih Ade Yasin karena kualitas yang ada di dalam dirinya, sehingga masyarakat tidak mempermasalahkan atau tidak mempertimbangkan kejadian penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh kakaknya, Rahmat Yasin, pada tahun 2014.

Jika melihat dari perubahan perolehan kursi partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Bogor pada pemilu 2014 dan 2019 kemenangan Ade Yasin mempengaruhi peta politik yang ada di lembaga legislatif Kabupaten Bogor khususnya partai pengusung PPP yang mengalami penurunan. Pada pemilu 2014 terdapat sepuluh partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Bogor. Pembagian 50 kursi DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2018 yakni Gerindra 6 kursi, PKS 5 kursi, Demokrat 4 kursi, Nasdem 3 kursi, PAN 3 kursi, Golkar 9 kursi, PPP 7 kursi, PDIP 7 kursi, PKB 3 kursi, dan Hanura 3 kursi. Sedangkan pada pemilu 2019 dari 55 kursi DPRD hanya 9 partai politik yang berhasil lolos dan mendapatkan kursi khususnya partai Gerindra yang meningkat 5 kursi dibandingkan periode sebelumnya. Gerindra mendapatkan 14 kursi, PKS 9

kursi, Golkar 6 kursi, PPP 6 kursi, PDIP 6 kursi, Demokrat 6 kursi, PAN 5 kursi, PKB 2 kursi, dan Hanura 1 kursi. PPP sebagai partai pengusung Ade Yasin di pilkada 2019 tidak memberikan pengaruh signifikan kepada partai karena mengalami penurunan perolehan kursi. Wakil Bupati Iwan Setiawan memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Gerindra dalam pemilihan legislatif dengan mendapatkan empat belas kursi artinya meningkat lima kursi dari pemilihan legislatif 2014.

Melihat dari partai pengusung dan pendukung Ade Yasin – Iwan Setiawan yaitu PPP, PKB, dan GERINDRA jumlah kursi ketiga partai tersebut di DPRD Kabupaten Bogor sebanyak 16 kursi. Jumlah ini hampir tiga puluh persen dari total kursi di DPRD Kabupaten Bogor. Jika melihat dari partai pengusung dan pendukung pasangan calon nomor urut tiga Ade Ruhandi – Inggrid Kansil yaitu PKS, PAN, Nasinal Demokrat, Demokrat, dan Golkar lima partai politik ini memiliki total kursi 23 kursi DPRD. Hampir lima puluh persen dari total kursi DPRD Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Bogor memiliki kedekatan emosional dengan partai politik, berdasarkan hasil perhitungan suara pasangan calon Ade Yasin – Iwan Setiawan dan Ade Ruhandi – Inggrid Kansil merupakan pasangan kuat dengan perolehan suara dua terbesar. Selisih suara sebanyak 2,38% diasumsikan sebagai pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan kualitas atau latar belakang kandidat.

Masyarakat Kabupaten Bogor sejak kepemimpinan Rachmat Yasin lebih mengarah pada perilaku memilih psikologis. Pilihan partai dan orientasi kandidat dibuktikan dengan strategi yang dilakukan oleh Rachmat Yasin sebelum terpilih sebagai Bupati Bogor tahun 2008 dan dilakukan kembali oleh adiknya Ade Yasin sebelum pemilihan kepala daerah 2018. Rachmat Yasin menjalin komunikasi dengan masyarakat Kabupaten Bogor sejak tahun 2005. Kabupaten Bogor dengan jumlah kecamatan yang besar, empat puluh kecamatan, dimanfaatkan oleh Rachmat yasin untuk membantuk masyarakat ditingkat kecamatan yang belum berembang. Sehingga masyarakat merasakan sosok Rachmat Yasin yang banyak membantu walaupun saat itu bukan seorang pejabat publik atau kepala daerah.

Cara ini juga dilakukan oleh Ade Yasin – Iwan Setiawan selama proses kampanye. Mendatangi daerah atau kecamatan dari tingkat daerah yang tertinggal terlebih dahulu, setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat daerah tertinggal tersebut baru naik tingkat ke kecamatan besar dengan masyarakat yang lebih maju.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor tahun 2018 sebenarnya menjadi kesempatan besar bagi para pasangan calon karena tidak ada kandidat petahana. Selain itu kehadiran lima pasangan calon juga sebenarnya dapat memberikan dampak terhadap cara memilih menentukan pilihan dari lima pasangan calon tersebut. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 terdapat empat pasangan calon dan dua diantaranya adalah pasangan independen. Rachmat Yasin, kakak kandung Ade Yasin, mendapat dukungan dari sembilan partai politik saat itu. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah 2018 terdapat lima pasangan calon dan Ade Yasin hanya di dukung oleh tiga partai, yaitu PPP, PKB, dan Gerindra. Memiliki latar belakang politik yang kuat, isu kekuasaan keluarga Yasin yang besar menjadi salah satu indikator keberhasilan Ade Yasin dan Iwan Setiawan memenangkan suara masyarakat Kabupaten Bogor.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel kualitas kandidat dan pilihan partai politik dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Bogor (Analisis Deskripsi Kualitas Kandidat dan Pilihan Partai Politik dengan Pilihan Bupati di Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Bogor Tahun 2018)”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Fenomena politik yang dijelaskan pada latar belakang masalah penelitian diatas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor berdasarkan kualitas kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018?

2. Bagaimana perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor berdasarkan pilihan partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor berdasarkan kualitas kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018.
2. Menggambarkan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor berdasarkan pilihan partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

Berguna dalam perkembangan teori ilmu politik terutama teori perilaku politik atau perilaku memilih dan menjadi pedoman dalam penelitian perilaku memilih selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berguna dalam menjelaskan penggunaan teori perilaku memilih dalam perpolitikan di Indonesia dan berguna bagi aktor politik tentang perilaku politik di Kabupaten Bogor.

1.5 Kerangka Teoritik

Partisipasi masyarakat di suatu negara dalam pemilihan umum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk suatu keputusan bersama. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau tidak. Warga negara yang memutuskan untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan harus menentukan partai apa dan kandidat yang akan dipilih nanti. Ketika menggunakan hak suara tentu memiliki alasan mengapa memilih salah satu partai politik dan kandidat tersebut. Alasan memilih ini dapat dipahami menggunakan teori perilaku memilih atau *voting behavior*.

Menurut Dennis Kavanagh dalam buku *Political Science and Political Behavior* terdapat tiga pendekatan dalam memahami kecenderungan perilaku memilih. Tiga pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologis, psikologis, dan pendekatan rasional.

1.5.1 Pendekatan Sosiologis

Kegiatan memilih yang berkaitan dengan hal sosial merupakan ciri dari pendekatan sosiologis. Latar belakang demografi dan sosial ekonomi mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya seperti jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, agama, dan pendapatan (Kavanagh, 1983). Model pertama dari pendekatan sosiologis dikenal Mazhab Columbia yang dijelaskan oleh Lezarsfield dan ilmuwan lain dari Columbia University Bureau of Applied Social Science (Erowati, 2005). Lingkungan sosial membentuk norma masing – masing dan ketaatan terhadap norma tersebut. Tujuan dari norma adalah membentuk integrasi yang bisa mengontrol perilaku seseorang dengan tekanan sehingga setiap masyarakat akan menyesuaikan diri. Individu tentu menginginkan hidup tenang tanpa ketegangan sosial.

Karakteristik sosial dan kelompok sosial memberikan pengaruh cukup besar yang berkaitan keputusan seseorang ketika menentukan pilihan. Gerald Pomper dalam penelitiannya tentang hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mengatakan predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku seseorang.

Predisposisi dapat berupa agama, tempat tinggal, kelas sosial, dan karakteristik demografis. Pemahaman terkait pendekatan sosiologis dan faktor eksternal lebih dominan atau lebih mempengaruhi seseorang ketika menentukan pilihan. Proses sosialisasi dalam kondisi sosiologis seseorang akan membentuk perilaku politik seseorang dari luar melalui nilai yang ditanamkan.

1.5.2 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dikenal berkembang dalam mazhab Michigan (Efriza, 2012). Campbell, Gurin, dan Miller merupakan tokoh yang mengembangkan pendekatan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam keterkaitan perilaku pemilu dengan kemasyarakatan terdapat dua hal yang menjadi pembahasan utama. Pengaruh jangka pendek dan persepsi dari diri sendiri terhadap kandidat politik. Penilaian dan persepsi dari status seseorang dalam partai atau pilihan partai turut mempengaruhi keputusan pemilih dalam menentukan pilihannya. Proses sosialisasi politik dapat terjadi di lingkungan sosial seseorang bahkan di dalam lingkungan inti seperti keluarga. Lingkungan sosial lain yang dapat menjadi proses sosialisasi politik adalah lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan organisasi sosial, dan keagamaan.

Pilihan partai, orientasi isu politik, dan orientasi kandidat adalah tiga faktor yang sering mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan politik menurut pendekatan psikologis. Pendekatan ini lebih menekankan pada konsep sosialisasi dan sikap politik sebagai indikator utama untuk menjelaskan perilaku memilih dibandingkan pengelompokan sosial seperti pendekatan sosiologis. Pemilih menentukan pilihan politiknya berdasarkan sosialisasi yang diterima terhadap suatu partai sehingga sikap seseorang sebagai bentuk refleksi dari kepribadian orang tersebut. Pendekatan psikologis menjelaskan seseorang memiliki ikatan emosional pada salah satu partai politik, orientasi terhadap isu politik, dan orientasi terhadap kandidat politik.

Aspek yang digunakan dalam penelitian ini dari pendekatan psikologis adalah ikatan emosional antara pemilih terhadap salah satu partai politik. Konsep ikatan emosional ini membahas persepsi yang ada dalam pikiran pemilih terhadap partai

politik yang ada sebagai peserta pemilu atau pilkada. Pendekatan psikologis menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan tentang pilihan partai politik. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang masalah atau fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Bogor, yakni Partai Persatuan Pembangunan sudah berkuasa di pemerintahan semenjak tahun 2008, kasus penyuapan lahan hutan yang dilakukan oleh mantan Bupati Rachmat Yasin tentunya membuat nama partai menjadi penilaian negatif namun pada pilkada 2018 Partai Persatuan Pembangunan tetap menang dengan mencalonkan Ade Yasin bersama Iwan Setiawan. Pemilih yang memiliki alasan memilih karena pilihan partai politik disebut pemberi suara reaktif (Nursal, 2004).

1.5.3 Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional berkembang tahun 1960. Pendekatan rasional pertama kali digagas oleh Anthony Downs. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari ilmu ekonomi (Roth, 2008). Anthony Down menggambarkan bahwa pemilihan umum adalah pasar atau *market* yang harus memiliki penawaran atau *supply* dan permintaan atau *demand*. Penawaran dalam pendekatan ini adalah partai politik dan permintaan yang dimaksud adalah pemilih. Pendekatan ini menentukan pilihan seorang berdasarkan seberapa besar hasil kerja kandidat politik atau partai politik yang bermanfaat bagi dirinya secara menyeluruh. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah di masa lalu. Jadi penilaian seorang tidak hanya kepada partai yang sedang berkuasa tetapi juga kepada partai yang pernah berkuasa dan maju kembali dengan kandidat politik yang berbeda ataupun sama. Berdasarkan penjelasan ini bentuk penilaian menjadi hal penting karena jika penilaian seseorang terhadap kandidat atau partai politik positif maka besar kemungkinan akan dipilih, namun jika penilaian terhadap kandidat atau partai politik negatif maka akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari pemilih tersebut.

Pendekatan rasional menempatkan penilaian seseorang terhadap kandidat atau partai sebagai perhitungan keuntungan atau kerugian ketika memilih. Bagi

seorang pemilih, pertimbangan untung dan rugi dalam pemilihan digunakan untuk menghasilkan keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, khususnya membuat keputusan untuk ikut memilih atau memilih untuk tidak mengikuti pemilihan (Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992).

Pemilih yang bersifat rasional dalam menentukan pilihannya membutuhkan informasi yang lengkap dan terperinci tentang kandidat yang akan dipilih. Hal ini menjadi kendala dalam pendekatan rasional karena jika informasi yang diterima tidak lengkap atau bahkan tidak ada informasi tentang kandidat dalam pemilu atau pilkada maka pemilih akan memiliki dengan ketidaktahuan tentang Kandidat. Oleh sebab itu pemilih akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kandidat melalui cara-cara seperti media, kelompok kepentingan, partai politik, atau internet yang dapat dipercayai oleh pemilih sebagai pemberi informasi yang benar tentang kandidat peserta pemilu atau pilkada.

Pendekatan rasional menjadi salah satu pendekatan selain pendekatan psikologis yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan adalah kualitas kandidat. Pemilih yang menjadikan kualitas kandidat sebagai alasan memilih akan mengumpulkan informasi lengkap tentang kandidat untuk menentukan kandidat yang paling berkualitas untuk memimpin. Informasi tentang kualitas kandidat akan meyakinkan pemilih untuk mempercayai kandidat tersebut menjalankan pemerintahan selama satu periode.

Melalui penjabaran tiga pendekatan teori perilaku memilih atau *voting behavior* peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan psikologis dan rasional. Pilihan Partai Politik merupakan turunan dari pendekatan psikologis dan Kualitas Kandidat merupakan turunan dari pendekatan rasional. Peneliti tidak menggunakan pendekatan sosiologis sebagai salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini karena peneliti berlandaskan pada fenomena politik yang terjadi di wilayah penelitian Kabupaten Bogor.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pemilihan Umum

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum sebagai dasar dari terbentuknya pemilihan. Sistem pemilu memiliki tiga variabel utama, yakni penyuaaraan, daerah pemilihan, dan formula pemilihan (Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 2010). Penyuaaraan atau *balloting* adalah tata cara yang harus diikuti oleh pemilih yang memenhi persyaratan ketika memberikan hak saura. Pemilih akan dihadapkan untuk memilih partai politik atau kandidat atau keduanya. Hal ini umum diterapkan oleh negara demokrasi seperti Indonesia. Daerah pemilihan atau *electoral district* berupa regulasi yang bertujuan untuk mengatur jumlah kursi yang ada di setiap daerah, dalam hal ini digunakan untuk pemilihan legislatif. Formula pemilihan merupakan cara perhitungan suara yang digunakan untuk menentukan pemenang dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum sebagai bukti demokrasi suatu negara dan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

a. Langsung

Artinya pemilih memiliki hak untuk memberikan suara dengan kehendaknya sendiri tanpa diwakili oleh pihak lain.

b. Umum

Artinya setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak menggunakan hak suaranya dan memiliki hak untuk dipilih tanpa diskriminasi jika sudah diatas 21 tahun.

c. Bebas

Artinya tidak boleh ada tekanan dari pihak lain terhadap pemilih ketika memberikan pilihan dan dalam pelaksanaan pemilihan umum hak warga negara dijamin oleh hukum.

d. Rahasia

Artinya suara atau pilihan seseorang tidak boleh disebarakan dengan alasan apapun tanpa izin pemilih tersebut. Bentuk paksaan melanggar hukum yang berlaku atas perlindungan pemilih.

e. Jujur

Artinya lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu atau partai politik, dan pemilih jujur sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.

f. Adil

Artinya penyelenggaraan pemilihan umum setiap peserta pemilu dan pemilih mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

1.6.2 Perilaku Memilih

Perilaku memilih merupakan turunan dari pembahasan tentang perilaku politik. Perilaku politik berhubungan dengan tujuan masyarakat dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta bentuk kekuasaan yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan (Sastroadmojo, 1995). Tujuan yang ingin dicapai merupakan tujuan bersama secara umum yang mensejahterakan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara secara merata termasuk dalam Tindakan perilaku politik atau lebih tepatnya perilaku politik ekonomi.

Perilaku memilih merupakan kondisi seorang pemilih diartikan sebagai pihak utama bagi para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar memberikan suaranya kepada kandidat tersebut (Firmanzah, 2007). Ramlan Surbakti dalam bukunya berjudul Partai, Pemilih, dan Demokrasi mendefinisikan perilaku memilih sebagai aktivitas pemberian suara yang berkaitan erat dengan kegiatan menentukan pilihan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum dan bila pemilih memutuskan untuk memilih maka pemilih akan

memilih atau mendukung kandidat tertentu (Surbakti, Partai, Pemilih, dan Demokrasi, 1997).

Dapat disimpulkan seorang pemilih akan menentukan apakah dirinya akan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum atau tidak. Pilihan untuk menggunakan hak suaranya maka pemilih akan menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin negara atau daerah. Di Indonesia seseorang yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya disebut golput.

1.6.3 Kualitas Kandidat

Sebagai calon kepala daerah kualitas kandidaT menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Masyarakat dewasa ini sebagai pemilih memiliki akses dengan mudah untuk mendapatkan informasi tentang kandidat kepala daerah, salah satunya melalui internet. Kualitas kandidat bukan hanya latar belakang pekerjaan atau latar belakang politik yang dimiliki, tetapi juga karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh kandidat harus sesuai dengan harapan masyarakat daerah pemilihan. Sergiovanni dan Carbolly menjelaskan kriteria yang harus dimiliki seorang kandidat yang berkualitas (Imawan, 1996):

1. Popularity

Popolaritas seorang kandidat menunjukkan seberapa dikenal kandidat tersebut dimasyarakat sebelum Ia terpilih sebagai calon kepala daerah. Popularitas seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman kandidat di partai politik. Posisi atau jabatan penting seorang kandidat di partai politik dapat membantu kandidat dikenal oleh masyarakat melalui program parti politik.

2. Acceptabilty

Penilaian positif dari masyarakat terhadap seorang kandidat akan mempengaruhi kelayakan kandidat untuk diterima oleh masyarakat sebagai kepala daerah.

3. Capability

Kapabilitas seorang kandidat dimata masyarakat dilihat dari latar belakang pengalaman yang dimiliki di pemerintahan dan juga pendidikan. Hal ini

dikarenakan masyarakat ingin memiliki kepala daerah yang mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dengan kebijakan yang tepat. Selain

1.6.4 Pilihan Partai Politik

Partai politik dapat didefinisikan sebagai kumpulan beberapa atau banyak orang secara terorganisir yang memiliki visi, misi, orientasi, ide, dan nilai yang sama (Budiardjo, 1982). Ada tiga pendekatan dalam memahami proses terbentuknya partai politik (Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 2010). Pertama, pendekatan kelembagaan, pendekatan ini memahami relasi antara parlemen dan munculnya partai politik artinya partai politik dibentuk dari Lembaga legislatif dan eksekutif karena dibutuhkan untuk membangun komunikasi dengan warga negara dan mengarahkan dukungannya masyarakat. Kedua, sejarah atau sisi historis, partai politik muncul dari upaya sistem politik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan melakukan perubahan secara luas. Masalah tersebut terjadi pada masa transisi sistem politik yang dimulai dari perubahan struktur masyarakat. Perubahan struktur tersebut menjadi penyebab dari tiga jenis krisis, yaitu integrasi, legitimasi, dan partisipasi. Partai politik menjadi solusi dalam penyelesaian tiga krisis tersebut. Ketiga, partai politik sebagai modernisasi bidang sosial dan ekonomi. Semakin berkembangnya masyarakat dan teknologi membentuk masyarakat yang lebih modern atau lebih maju sehingga terbentuk kebutuhan baru tentang wadah politik yang bisa membantu masyarakat luas.

Ikatan atau hubungan emosional seseorang terhadap suatu partai politik mempengaruhi pilihan politik saat pemilihan kepala daerah. Terdapat empat hal yang berhubungan dengan pilihan partai, yaitu ketertarikan pada partai politik, simpatikan partai politik, keterikatan partai politik, dan status anggota partai politik (Seran, 2018). Pemilih akan memiliki rasa atau hubungan lebih intim dengan partai politik yang dipilih. Contohnya seseorang yang pernah berkerja di salah satu partai politik akan memiliki keterikatan untuk memilih partai politik tersebut.

Selain penilaian pemilih terhadap partai politik, pilihan partai juga dipengaruhi oleh sosok penting dalam partai politik seperti ketua partai. Tidak sedikit masyarakat yang memilih partai politik karena memiliki keterikatan atau hubungan dengan ketua partai atau sosok penting dalam partai politik. Oleh sebab itu latar belakang ketua partai baik ditingkat pusat maupun daerah akan memberikan pengaruh besar terhadap keputusan politik pemilih. Variabel partai politik menjadi hal penting untuk diteliti dalam penelitian perilaku memilih suatu daerah dan sejalan dengan teori perilaku memilih pendekatan psikologis. Selain itu, pilihan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan anggota DPRD juga dapat menjadi penelitian untuk menemukan jawaban apakah anggota legislatif daerah yang dipilih mempengaruhi pilihan partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

1.7 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan tentang Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018 adalah

1.7.1 Variabel Terikat (Y)

- Fitri Putra Nugraha – R Bayu Syahjohan
- Ade Munawaroh Yasin – Iwan Setiawan
- Ade Ruhandi – Ingrid Kansil
- Gunawan Hasan – Fickry Zulfikar Irama
- Ade Wardhana Adinata – Asep Ruhayat

1.7.2 Variabel Bebas (X)

1. Kualitas Kandidat (X1)
 - *Popularity*
 - *Acceptability*
 - *Capability*
2. Pilihan Partai Politik (X2)
 - Ikatan Emosional

- Sosialisasi
- Loyalitas

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Fokus Penelitian

Untuk menghindari sifat bias dari pertanyaan penelitian yang digunakan, maka fokus penelitian ini adalah menjelaskan hubungan antara kualitas kandidat dan pilihan partai politik terhadap perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018.

1.8.2 Tipe Penelitian

Perilaku memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018 bertujuan untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor. Metode Kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2012) menjelaskan metode kuantitatif sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan populasi tertentu, analisis data yang bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapan sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam rancangan penelitian deskriptif karena menjelaskan tentang opini, sikap, dan perilaku yang obserasinya dilakukan di suatu lingkungan (Sahab, 2018).

1.8.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor dengan mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Peneliti tidak mengambil dari beberapa kecamatan agar adanya representasi menyeluruh dari seluruh pembagian wilayah yang ada di Kabupaten Bogor.

1.8.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif sering kali mendapatkan populasi yang heterogen atau bervariasi. Indonesia merupakan masyarakat yang bersifat heterogen. Oleh sebab itu pengambilan sampel yang dilakukan harus disesuaikan

dengan karakteristik populasi yang diambil. Dalam hal ini teknik acak terlapis (*Stratified Random Sampling*) adalah teknik pengambilan sampel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini ada dua jenis. *Stratified Random Sampling*, yaitu proporsional sampel-sebanding dengan jumlah populasi dan nonproporsional-sampel tidak sebanding dengan jumlah populasi (Priyono, 2016). **Pada penelitian ini jenis yang digunakan adalah sampel proporsional sampel sebanding. Hal ini karena pengambilan sampel secara acak dan dasar pemilihan secara acak. Selain itu tujuan dari sampel ini adalah untuk diuji dan dianalisis.** Kabupaten Bogor termasuk dalam kabupaten dengan jumlah penduduk yang besar. Sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 5.427.068 jiwa. Besarnya jumlah populasi, keterbatasan tenaga peneliti, dan waktu maka pengambilan sampel atau penentuan responden menggunakan teknik *Stratified Random Sampling* dikarenakan populasi yang ada memiliki sifat heterogen.

**Tabel 1. 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bogor
Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Data Pemilih Tetap
1	Nanggung	62.928
2	Leuwiliang	79.477
3	Leuwisadeng	51.568
4	Pamijahan	104.196
5	Cibungbulang	92.012
6	Ciampea	106.089
7	Tenjolaya	42.128
8	Dramaga	70.248
9	Ciomas	99.234
10	Tamansari	69.746
11	Cijeruk	56.867
12	Cigombong	62.515

13	Caringin	81.544
14	Ciawi	71.509
15	Cisarua	82.235
16	Megamendung	68.265
17	Sukaraja	118.117
18	Babakan Madang	66.791
19	Sukamakmur	55.383
20	Cariu	36.349
21	Tanjungsari	38.743
22	Jonggol	89.805
23	Cileungsi	151.840
24	Klapanunggal	69.048
25	Gunung Puteri	187.633
26	Citeureup	127.192
27	Cibinong	199.198
28	Bojonggede	153.710
29	Tajurhalang	68.074
30	Kemang	64.745
31	Rancabungur	38.176
32	Parung	75.386
33	Ciseeng	68.774
34	Gunungsindur	70.206
35	Rumpin	93.628
36	Cigudeg	84.553
37	Sukajaya	44.709
38	Jasinga	69.516
39	Tenjo	48.872
40	Parungpanjang	73.816
TOTAL		3.294.825

Sumber: KPU Kabupaten Bogor

Sampel adalah jumlah yang dipilih untuk mewakili suatu populasi di suatu wilayah. Rumus penghitungan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel minimum

N : Jumlah populasi (3.294.825 terdiri dari 40 kecamatan)

E : Kesalahan yang dapat ditolerir adalah 10% atau 0,1

$$n = \frac{3.294.825}{1 + 3.294.825 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{3.294.825}{1 + 3.294.825 \cdot (0,01)}$$

$$n = \frac{3.294.825}{32.949,25}$$

$$n = 99,9969$$

$$n = 100$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin diatas menunjukkan besarnya sampel yang dapat mewakili populasi sebanyak 3.294.825 pemilih adalah 100 orang. Pembagian sampel per kecamatan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kuota Sampel
1	Nanggung	2
2	Leuwiliang	2
3	Leuwisadeng	2
4	Pamijahan	3
5	Cibungbulang	3

6	Ciampea	3
7	Tenjolaya	1
8	Dramaga	2
9	Ciomas	3
10	Tamansari	2
11	Cijeruk	2
12	Cigombong	2
13	Caringin	3
14	Ciawi	2
15	Cisarua	2
16	Megamendung	2
17	Sukaraja	4
18	Babakan madang	2
19	Sukamakmur	2
20	Cariu	1
21	Tanjungsari	1
22	Jonggol	3
23	Cileungsi	5
24	Klapanunggal	2
25	Gunung Puteri	6
26	Citeureup	4
27	Cibinong	6
28	Bojonggede	5
29	Tajurhalang	2
30	Kemang	2
31	Rancabungur	1
32	Parung	2
33	Ciseeng	2
34	Gunungsindur	2
35	Rumpin	3

36	Cigudeg	3
37	Sukajaya	1
38	Jasinga	2
39	Tenjo	1
40	Parungpanjang	2
TOTAL		100

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada obyek atau sampel yang terpilih. Data primer yang diolah menjadi data utama untuk dianalisis guna mendapatkan jawaban dari perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, penelitian terdahulu, artikel jurnal dalam bentuk cetak atau digital untuk menambah sumber kajian dalam penelitian perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari pengumpulan data primer dan sekunder merupakan data mentah yang harus diolah atau dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk menjelaskan kondisi sosial yang tampak dan mendalami hubungan perilaku memilih masyarakat dengan fenomena politik yang terjadi pada PILKADA Kabupaten Bogor tahun 2018.

Analisis data menggunakan tabel frekuensi yang ada dalam aplikasi SPSS 25. Aplikasi SPSS25 digunakan sebagai alat untuk membantu peneliti dalam proses analisis data primer. Tabulasi silang digunakan untuk mengetahui arah

hubungan variabel kualitas kandidat dan pilihan partai politik terhadap perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bogor.